

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju Pembangunan Ekonomi Daerah yang lebih berdaya tumbuh tinggi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Daerah di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Otonomi Daerah membawa konsekuensi pada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah di Kabupaten Nagekeo. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagai tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Adanya otonomi Daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan semakin besar sehingga tanggungjawab yang diembannya akan bertambah banyak. Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada Daerah dalam rangka Otonomi Daerah dapat

menjadi suatu berkah bagi Daerah. Namun disisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah dalam pelaksanaannya, karena semakin besar urusan Pemerintah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan pra sarana daerah. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri (Wulandari,2010)

Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan kewenangan memungut dan memperdayagunakan Pajak dan Retribusi Daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya Nasional yang berada di daerah. Dana perimbangan lainnya: hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Kemampuan Keuangan Daerah yang dimaksud adalah sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna untuk membiayai kebutuhan keuangan sendiri guna untuk membiayai kebutuhan keuangan Daerah tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah di Kabupaten Nagekeo dalam pengelolaan keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten Nagekeo yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas

pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang di miliki oleh Kabupaten Nagekeo.

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nagekeo tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut ;

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 2017-2019**

Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Presentasi
2017	46.160.609.301	46.129.714.879	99%
2018	29.276.706.505	30.850.179.938	105%
2019	31.124.850.353	31.068.286.543	99,82%

*Sumber : Dinas Pendapatan Penerimaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo 2020*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tentang realisasi anggaran pendapatan asli daerah pada tahun 2017 target PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 46.160.609.301 dengan realisasi sebesar Rp.46.129.714.879 dengan presentase 99% belum mencapai efektif. Target PAD pada tahun 2018 sebesar Rp.29.276.706.505 dengan realisasi sebesar Rp.30.850.179.938 dengan presentase 105% sudah mencapai efektif. Sedangkan pada tahun 2019 Target PAD yang ditetapkan sebesar Rp.31.124.850.353 dengan realisasi yang ditetapkan sebesar Rp.31.068.286.543 dengan presentase 99,82% belum mencapai efektif.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nus Dheni selaku staf bagian keuangan menyatakan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten Nagekeo terhadap pemberian dana dari pemerintah pusat yang merupakan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten

Nagekeo. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru agar presentase ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintahan pusat dapat berkurang.

Safitri (2013), melakukan penelitian tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2007- 2011 di kota Makassar dengan menunjukkan hasil perkembangan kemampuan keuangan daerah kota Makassar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di anggap masih kurang. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada tahun penelitian dan lokasi penelitian. Afandi (2012), melakukan penelitian tentang Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuan Batu Selatan. dengan menunjukkan hasil kemampuan keuangan daerah kabupaten Labuan Batu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah kabupaten Labuan Batu Selatan bisa melaksanakan tugas pemerintah yaitu penyediaan pelayanan publik dan pembangunan dengan cukup baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi dan tahun penelitian.

Sanny Wurangian (2017), melakukan penelitian mengenai Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi daerah di Kota Tomohon. Dengan hasil menunjukkan masih kurangnya tingkat kemandirian

serta kurang efisiensi dalam merealisasikan pengeluarannya . persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mereplikasi penelitian yang sama dengan pendekatan kondisi pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Nagekeo dimana peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Otonomi Daerah. Kondisi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun Kabupaten Nagekeo cenderung mengalami penurunan, mendorong peneliti untuk mengetahui Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo dalam melaksana Otonomi Daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2019**”

#### **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana kemampuan keuangan daerah kabupaten Nagekeo dalam mendukung pelaksanaan otonomi Daerah tahun 2017-2019?.

#### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada :

1. Penelitian ini dibatasi hanya membahas tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2017-2019 dengan menggunakan beberapa rasio di antaranya : ,rasio derajat desentralisasi fisik, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah dan rasio keserasian sebagai variable dependen dan variable independennya adalah Otonomi daerah.
2. Lokasi penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagekeo yang berada di Jalan Mohamad Hatta Mbay Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Periode penelitian dari tahun 2017-2019.

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah di kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tahun 2017-2019.

#### **E. Manfaat penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
  - a) Manfaat penelitian bagi pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan terkait dengan pengelolaan keuangan dalam upaya peningkatan kemandirian daerah.

- b) Manfaat penelitian bagi pihak lain, dapat memberikan informasi tambahan khususnya bagi pihak berkepentingan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan keuangan daerah.
- c) Manfaat penelitian bagi Peneliti, menambah pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah dan seberapa besar tingkat kemandirian daerah khususnya di Kabupaten Nagekeo

## 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian di bidang keuangan daerah dan secara umum bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan keuangan daerah di Kabupaten Nagekeo.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan diuraikan secara garis besar dalam setiap bab, diharapkan memberikan sedikit gambaran mengenai skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bagian dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB. I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB. II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan teori yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual serta hipotesis penelitian.

### BAB. III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode-metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi. Bagian dari metode penelitian adalah rancangan penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengambilan data, serta metode dan tehnik analisis data.

### BAB. IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan data yang di peroleh dari realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur

### BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisikan tentang simpulan, implikasi dan keterbatasan penelitian, serta saran yang bermanfaat bagi peneliatian selanjutnya.